

Analisis Praktik Pelaporan Keuangan Masjid sebagai Organisasi Nirlaba Berdasarkan ISAK 335 dalam Akuntansi Sektor Publik

Diva Fadillah Ramika¹, Faradilla Raudha Azievan², Dhea Sabrina Putri³, Ahmad Valevi⁴, Muhammad Yazid⁵, Cindy Arya Zona⁶, Jeni Sopianti⁷, Sri Adella Fitri⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

*Email divaafadillahramika@gmail.com¹, faradillaraudha4@gmail.com², sabrinadhea072@gmail.com³, yazidyazid1411121@gmail.com⁴, ahmadvalevi93@gmail.com⁵, cindyaryazona@gmail.com⁶, jenisopianti@gmail.com⁷, sri.af@uinmybatusangkar.ac.id⁸

Sejarah Artikel:

Diterima 07-06-2026
Disetujui 13-06-2026
Diterbitkan 15-06-2026

ABSTRACT

As nonprofit organizations, mosques play a vital role in managing community funds, making clear and accountable financial management essential. This study aims to analyze the implementation of public sector accounting and financial reporting in accordance with ISAK 335 at the Ihsan Mosque in Batusangkar, the Ishlah Mosque in Pariangan, and the Baburrahim Mosque in Batu Basa. The method used in this study is qualitative descriptive through observation, interviews, and document collection. The results show that all three mosques still use simple record-keeping, consisting of cash receipts and disbursements, and have not yet adopted ISAK 335. Some obstacles encountered include a lack of human resources, the absence of financial audits, and administrative systems that remain conventional. Nevertheless, the mosques have additional sources of income, such as the rental of shop houses and the management of agricultural land, to support community worship and social activities. This study concludes that the implementation of ISAK 335 is essential to create more transparent, accountable, and professional mosque financial management.

Keywords: Public Sector Accounting, ISAK 335, Non-Profit Organizations, Transparency, Accountability, Mosques.

ABSTRAK

Masjid sebagai lembaga non profit memainkan peran penting dalam pengelolaan dana masyarakat, sehingga diperlukan manajemen keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi di sektor publik dan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 335 pada Masjid Ihsan Batusangkar, Masjid Ishlah Pariangan, dan Masjid Baburrahim Batu Basa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga masjid masih menerapkan pencatatan yang sederhana, berupa kas masuk dan kas keluar, dan belum mengadopsi ISAK 335. Beberapa hambatan yang ditemui termasuk kurangnya sumber daya manusia, tidak adanya audit keuangan, dan sistem administrasi yang masih konvensional. Meskipun demikian, masjid memiliki sumber pendapatan tambahan seperti penyewaan ruko dan pengelolaan lahan pertanian untuk mendukung kegiatan ibadah dan sosial masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ISAK 335 sangat diperlukan untuk menciptakan manajemen keuangan masjid yang lebih terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan profesional.

Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, ISAK 335, Organisasi Nirlaba, Transparansi, Akuntabilitas, Masjid

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ramika, D. F., Azievan, F. R. ., Putri, D. S., Valevi, A. ., Yazid, M. ., Zona, C. A., Sopianti, J., & Fitri, S. A. (2026). Analisis Praktik Pelaporan Keuangan Masjid sebagai Organisasi Nirlaba Berdasarkan ISAK 335 dalam Akuntansi Sektor Publik. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 5797-5808. <https://doi.org/10.63822/jshvk490>

PENDAHULUAN

Organisasi nonlaba didefinisikan sebagai entitas yang dibentuk oleh individu atau kelompok dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa orientasi untuk memperoleh keuntungan finansial. Fokus utama organisasi ini adalah aktivitas sosial yang bersifat sukarela, tidak bersifat komersial (Filiyanti & Ardhiarisca, 2025). Masjid dimaknai sebagai salah satu contoh nyata organisasi nonlaba yang berperan penting dalam kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat. Masjid memiliki fungsi utama sebagai tempat ibadah sekaligus pusat aktivitas keagamaan umat islam (Ula et al., 2021).

Akuntansi sektor publik menjadi sistem yang penting dalam mengelola dan melaporkan informasi keuangan pemerintahan dan lembaga sektor publik lainnya. Untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan akurat, relevan, dan bisa diandalkan, diperlukan sebuah kerangka konseptual yang menjadi landasan bagi penyusunan laporan keuangan. Dalam konteks ini, kerangka konseptual memiliki tujuan dan peranan penting yang tidak dapat diabaikan (Purati et al., 2023).

Keberadaan masjid tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan dana yang berasal dari amal atau sumbangan umat yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (Yusra & Si, 2016). Keterkaitan antara akuntansi sektor publik dan lembaga keagamaan dapat dilihat dari fungsi keduanya dalam mengelola dana yang berasal dari masyarakat untuk kepentingan publik. Masjid sebagai lembaga keagamaan menerima dana seperti infak, sedekah, wakaf, dan donasi lainnya yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik diperlukan sebagai pedoman dalam proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan agar informasi keuangan yang disajikan dapat dipercaya, relevan, serta mendukung terciptanya tata kelola masjid yang baik.

Menurut Filiyanti & Ardhiarisca (2025) Fenomena organisasi saat ini menunjukkan bahwa Masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba Meskipun standar telah tersedia, nyatanya banyak organisasi nonlaba yang belum menerapkannya, khususnya masjid, yang belum menerapkan ISAK 335 dalam pelaporan keuangannya. Salah satu contohnya adalah Masjid baburrahim yang berada di Kabupaten Situbondo. Masjid tersebut sangat aktif dalam berbagai aktivitas keagamaan dan sosial, namun pengelolaan keuangan masjid ini masih bersifat konvensional, yaitu hanya terbatas pada pencatatan kas masuk dan kas keluar. Sistem pencatatan seperti ini belum mampu menggambarkan kondisi keuangan masjid secara menyeluruh dan dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat mengenai transparansi penggunaan dana yang telah disumbangkan.

Permasalahan ini muncul akibat kurangnya pemahaman dan kemampuan pengelola masjid dalam menyusun laporan keuangan berbasis standar akuntansi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk merekonstruksi laporan keuangan Masjid Ihsan, Masjid Baburrahim dan Masjid Ishlah Pariangan berdasarkan ISAK 335 agar informasi yang disampaikan lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Rekonstruksi laporan keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung praktik tata kelola yang baik pada organisasi nonlaba, khususnya masjid.

Dalam penelitian ini ditemukan adanya fakta lapangan yang menunjukkan bahwa pengurus masjid, yang merupakan bagian dari pengelola keuangan masjid bukan dari seorang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, melainkan warga sekitar masjid yang ditunjuk secara sukarela untuk menjadi pengurus masjid. Kemudian, dalam pengelolaan keuangan tidak adanya kejelasan secara mendetail dan terperinci mengenai bentuk transparansi pengurus terhadap pengelolaan keuangan masjid. Sumber dana masjid yang umumnya diperoleh dari para jama'ah yang beribadah di masjid tersebut dan penggunaannya

sudah diklasifikasikan sesuai peruntukannya masing-masing.

KAJIAN LITERATUR

a. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, mengolah, dan melaporkan informasi keuangan tentang entitas yang beroperasi di sektor publik, seperti pemerintah, lembaga publik, dan organisasi nirlaba yang menerima dana publik. Konsep dasar Akuntansi Sektor Publik bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik serta memberikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan (Purati et al., 2023).

Salah satu organisasi dalam akuntansi sektor publik adalah organisasi nirlaba. Organisasi nonlaba merupakan organisasi yang tidak mencari keuntungan. Masjid dan yayasan merupakan organisasi nonlaba. Sebagai organisasi nonlaba, masjid atau yayasan dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu ISAK 335 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Mu'allimai et al., 2024). Organisasi Nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi yang berorientasi kepada laba. Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi nirlaba tidak semata-mata digerakkan oleh tujuan untuk mencari laba. Meski demikian *not-for-profit* juga harus diartikan sebagai *not-for-loss*.

Oleh karena itu, organisasi nirlaba selayaknya pun tidak mengalami *defisit*. Adapun bila organisasi nirlaba memperoleh *surplus*, maka *surplus* tersebut akan dikembalikan untuk pemenuhan kepentingan publik, dan bukan untuk memperkaya pemilik organisasi nirlaba tersebut. Dalam hal kepemilikan, kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali sebagaimana pada organisasi bisnis (Majid, 2019).

b. Akuntabilitas dan Transparansi pada Akuntansi Sektor Publik

Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam akuntansi sektor publik. Entitas sektor publik harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat. Akuntabilitas melibatkan pelaporan transparan dan akurat mengenai pengeluaran, pendapatan, dan aset yang dimiliki oleh entitas tersebut. Hal ini melibatkan tanggung jawab entitas sektor publik untuk melaporkan informasi keuangan dan kinerja secara transparan kepada pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, lembaga donor, dan lainnya.

Transparansi ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana dana publik digunakan dan untuk menghindari adanya penyalahgunaan atau tindakan yang tidak etis. Akuntabilitas mendorong entitas sektor publik untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan dana publik. Ini berarti bahwa semua transaksi keuangan dan informasi yang berkaitan harus dicatat dan dilaporkan dengan jelas (Purati et al., 2023). Menurut (Saiffuddin, 2020), Laporan keuangan masjid merupakan bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk masyarakat. Semakin besar dana yang telah dikelola, tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi masjid juga semakin besar.

c. Lembaga Keagamaan

Akuntansi sektor publik memiliki relevansi yang signifikan bagi rumah ibadah dan organisasi keagamaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang baik, mereka dapat menjaga transparansi, mengelola dan dengan efisien, mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku,

mengendalikan pengeluaran, dan memperkuat hubungan dengan para pengikut dan Masyarakat umum. Melalui praktik akuntansi yang baik, rumah ibadah dan organisasi keagamaan dapat mengelola dana mereka dengan lebih efisien. Dengan memantau penerimaan dan pengeluaran dana secara terperinci, mereka dapat mengidentifikasi area-area di mana pengeluaran dapat dioptimalkan dan memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara bijaksana untuk mendukung kegiatan keagamaan dan social (Castrawijaya, 2023).

d. Masjid

Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia. Lebih dari 80% penduduk di Indonesia beragama Islam. Masjid merupakan tempat yang tidak mungkin terpisahkan di kehidupan umat Islam (Yuliarti, 2019). Masjid Adalah rumah Allah SWT yang dibangun sebagai sarana bagi umat islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah SWT dengan baik. Selain itu, Masjid juga merupakan tempat pelaksanaan berbagai aktivitas ama shaleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng dan strategi perang, atau tempat mencari Solusi permasalahan yang terjadi ditengah-tengah umat (Castrawijaya, 2023).

Masjid dalam konteks akuntansi sektor publik dapat dipahami sebagai lembaga keagamaan yang bersifat nirlaba dan berfungsi melayani kepentingan masyarakat. Masjid tidak berorientasi pada pencarian keuntungan, melainkan berfokus pada pelayanan ibadah, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam pengelolaan keuangan dan aktivitas organisasi pada Masjid yang menjadi sampel kami, khususnya terkait kebutuhan penerapan sistem akuntansi organisasi nirlaba. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata pengelolaan keuangan, kegiatan operasional, serta perkembangan masjid berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan pihak pengurus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masjid Ihsan Batusangkar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yori selaku Sekretaris Pengurus Masjid Ihsan Batusangkar pada tanggal 8 Mei 2026, diperoleh beberapa informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian kami, Adapun beberapa pertanyaan yang diberikan pada saat wawancara tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Apakah pengurus sudah mengetahui atau mendengar tentang ISAK 335?

“Kalau pengurus harusnya indak sih, umumnya pengurus kami ko banyak yang lah tuo jadi ndak melek teknologi”.

“Kalau pengurus harusnya tidak tahu, umumnya pengurus kami kebanyakan sudah tua jadi tidak melek teknologi”.

Dari jawaban ini diketahui pengurus tidak mengetahui perihal ISAK 335 dikarenakan mayoritas pengurus sudah tua, jadi tidak memikirkan tentang ISAK 335, mereka hanya mengetahui penyusunan laporan keuangan berupa kas masuk dan kas keluar saja.

Dapat disimpulkan juga bahwa takmir/pengurus masjid berasal dari orang tua terdahulu yang memiliki bukan berlatar Pendidikan akuntansi sehingga belum memahami tentang pencatatan keuangan yang sesuai standar ISAK 335. Hal ini berkaitan dengan penelitian Najmudin & Bayinah (2022), Rata-rata tingkat pendidikan penyusun laporan keuangan masjid berada pada tingkat SMA. Dan dilihat dari sisi usia mereka berada di atas 45 tahunan. Tingkat pendidikan ini sangat mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman akuntansi. Sehingga takmir masjid yang bertanggung jawab dalam kepengurusan bendahara masjid minimal takmir memiliki tingkat pendidikan SMK Akuntansi atau S1 akuntansi agar dapat memberikan laporan keuangan yang berkualitas

b. Apakah masjid punya pendapatan lain selain dari infak dan sedekah?

“Iyo, dari masjid ado pendapatan selain dari infak samo sedekah, kami ado menyewakan tiga ruko di sampiang masjid, sabananya kami ndak ka buek ruko tapi yang bagian bawah Pustaka samo yang bagian ateh tu klinik cuman ndak jadi karna penggantian pengurus tu ndak jadi dilanjutan tu dijadian ruko. Untuak sewa ruko tu 1 tahun 7.000.000, tapi ado surang penyewa ruko tu yang unik stek, inyo maambiak sekali 3 tahun, nah seharusnya kan kalau 3 tahun nyo mambayia 21.000.000, tapi nyo maaagiah 25.000.000 atau labiah, labiah dari 21.000.000 tu nyo agiah untuk infak”.

“Iya, dari masjid ada pendapatan selain dari infak dan sedekah, kami ada menyewakan tiga ruko di samping masjid, sebenarnya tujuannya bukan untuk membangun ruko, tapi yang bagian bawah Pustaka dan bagian atas klinik, tapi tidak jadi karena penggantian pengurus dan dijadikan ruko. Untuk sewa ruko 1 tahun 7.000.000, tapi ada satu penyewa ruko yang sedikit unik, dia menyewa 3 tahun sekaligus, nah seharusnya kan kalua 3 tahun itu membayar 21.000.000, tapi dia memberi 25.000.000 atau lebih, lebih dari 21.000.000 itu dianggap infak.

Berdasarkan jawaban ini diketahui bahwa masjid ini memiliki pendapatan lain, seperti penyewaan ruko yang nantinya penerimaan uang sewanya dapat dialokasikan untuk pembangunan dan menjadi kas masuk bagi masjid.

c. Bagaimana sistem pencatatan keuangan yang digunakan pada masjid?

“Kalau kami kas masjid tu sadonyo untuk semua istilahnyo kalau untuk Pembangunan kami pakai kas masjid, untuk membayar honor guru kami pakai kas masjid. Kecuali wakaf, soalnya wakaf tu pasti diperuntukan untuk pembangunan masjid”.

“Kalau kami kas masjid disatukan semua seperti untuk Pembangunan kami menggunakan kas majid, untuk membayar gaji guru kami juga memakai kas masjid. Kecuali wakaf, soalnya wakaf itu pasti diperuntukan untuk Pembangunan masjid”.

Berdasarkan jawaban ini diketahui bahwa pencatatan keuangan masjid masih menggunakan pencatatan biasa seperti kas masuk dan kas keluar dan hanya memisahkan wakaf. Seluruh pendapatan yang ada masjid ini dicatat dengan cara digabungkan kedalam satu rekening

Masjid Ihsan merupakan salah satu lembaga keagamaan yang termasuk dalam organisasi sektor publik nirlaba. Sebagai organisasi nirlaba, masjid tidak berorientasi pada pencarian keuntungan, melainkan berfokus pada pelayanan masyarakat, kegiatan ibadah, pendidikan agama, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan aktivitasnya, Masjid Ihsan memperoleh sumber dana dari

infak, sedekah, zakat, wakaf, dan sumbangan masyarakat lainnya dan juga memperoleh pendapatan dari penyewaan ruko yang pendapatannya dialokasikan ke dalam kas masjid. Tentu penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada jamaah serta masyarakat sekitar.

Akuntansi sektor publik pada lembaga keagamaan memiliki peranan penting dalam mendukung pengelolaan keuangan masjid agar lebih tertib, efektif, dan dapat dipercaya. Penerapan akuntansi pada Masjid Ihsan dapat membantu pengurus dalam melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas secara sistematis. Dengan adanya pencatatan yang baik, seluruh dana yang masuk maupun yang digunakan untuk operasional masjid, pembangunan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial dapat diketahui secara jelas oleh jamaah.

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan Masjid Ihsan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti pencatatan yang masih sederhana, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi, serta belum diterapkannya laporan keuangan sesuai standar organisasi nirlaba secara lengkap. Sebagian besar pencatatan biasanya hanya berupa laporan kas masuk dan kas keluar yang diumumkan setiap minggu atau setiap bulan kepada jamaah. Walaupun sederhana, bentuk pelaporan tersebut sudah mencerminkan adanya upaya transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Akuntabilitas menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan masjid karena dana yang digunakan berasal dari masyarakat. Pengurus Masjid Ihsan harus mampu menunjukkan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masjid. Transparansi laporan keuangan juga dapat meningkatkan kepercayaan jamaah sehingga masyarakat lebih terdorong untuk memberikan sumbangan atau bantuan kepada masjid.

Dalam praktiknya, penerapan akuntabilitas keuangan erat kaitannya dengan transparansi dan aksesibilitas informasi. Transparansi menunjukkan keterbukaan organisasi dalam menyampaikan informasi mengenai sumber serta penggunaan dana secara jelas. Keterbukaan informasi, termasuk melalui media digital, mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi nirlaba. Aksesibilitas informasi juga memudahkan masyarakat untuk memperoleh dan memahami laporan keuangan sehingga fungsi pengawasan publik dapat berjalan dengan baik (Buaton et al., 2026)

Selain sebagai tempat ibadah, Masjid tidak hanya berperan sebagai pendukung utama kegiatan ibadah ritual yang berfungsi meningkatkan kesehatan mental spiritual, melainkan juga telah digunakan untuk berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya (Nata, 2021). Masjid Ihsan juga memiliki fungsi sosial dan pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program keagamaan seperti pengajian, santunan anak yatim, kegiatan Ramadan, pendidikan Al-Qur'an, serta kegiatan sosial lainnya. Dengan adanya sistem akuntansi yang lebih baik, pengurus masjid dapat melakukan perencanaan anggaran secara lebih efektif dan mengurangi risiko terjadinya kesalahan ataupun penyalahgunaan dana.

Penerapan akuntansi sektor publik pada Masjid Ihsan juga dapat dilakukan dengan menyusun laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan aktivitas sesuai dengan karakteristik organisasi nirlaba. Penyusunan laporan tersebut akan memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan masjid dan memudahkan proses evaluasi pengelolaan dana. Selain itu, laporan yang tersusun dengan baik dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah, donatur, dan masyarakat luas.

Dengan demikian, penerapan akuntansi sektor publik pada Masjid Ihsan sangat penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendukung keberlangsungan program-program keagamaan dan sosial yang dijalankan oleh masjid sebagai lembaga nirlaba.

2. *Masjid Ishlah Pariangan*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Suhaili Khatib Intan selaku Ketua Umum Pengurus Masjid Ishlah Pariangan pada tanggal 8 Mei 2026, kami juga mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian kami, Adapun beberapa pertanyaan yang diberikan pada saat wawancara tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Apakah pengurus sudah mengetahui atau mendengar tentang ISAK 335?

“Belum tahu karna kita sistemnya di masjid itu sifatnya sosial saja kan pengurus tu ndak ada di gaji kan, kemudian kita kerja samanya aja pengurus itu jadi kurang memikirkan kesejahteraan pengurus itu kurang kan memikirkan, kita akui saja”.

“Belum tahu karna kita sistemnya di masjid itu sosial dan pengurus tidak di gaji, kemudian pengurus itu Cuma kerja sama jadi kurang memikirkan kesejahteraan pengurus kita akui saja”.

Dari jawaban ini diketahui bahwa pengurus belum pernah mendengar tentang ISAK 335 dikarenakan lebih mengkedepankan sosial dan kekeluargaan, pencatatan laporan keuangannya hanya mencatat kas masuk dan kas keluar saja dan masi mecatatat menggunakan buku secara manual

- b. Apakah masjid punya pendapatan lain selain dari infak dan sedekah?

“Untuk ruko kita punya beberapa buah yang tanggung jawab masjid yang maksudnya fee nya, keuntungannya kan kita kerja sama dengan bapak yang punya tanah masjid kan, jadi hasil daripada sewa kadai itu ada duo kan, nah dua untuk datuak yang sebelah ni itu yang punya tanah kan. Sewanya satu kali itu 2.000.000 per 6 bulan, jadi 4.000.000 dalam 1 tahun”.

“Untuk ruko kita punya beberapa buah yang tanggung jawab masjid yang keuntungannya kita kerja sama dengan bapak yang punya tanah, jadi hasil dari sewa ruko itu ada dua, untuk datuak sebelah, dan yang punya tanah. Sewanya satu kali 2.000.000 per 6 bulan, jadi 4.000.000 dalam 1 tahun”.

Berdasarkan jawaban ini diketahui bahwa masjid memiliki pendapatan lain berupa ruko yang disewakan, uang sewa tersebut digunakan untuk keperluan masjid.

- c. Bagaimana sistem pencatatan keuangan yang digunakan pada masjid?

”Iya, kas masuk dan kas keluar saja yang rutin dicatat.

Dari jawaban diatas diketahui bahwa pengurus masjid masih menyusun pencatatan keuangan dengan cara kas masuk dan keluar saja, blm sesuai dengan ISAK 335. Setiap transaksi kas, baik penerimaan maupun pengeluaran yang dibuktikan dengan nota, dicatat dan disusun dalam laporan keuangan mingguan oleh bendahara

Masjid Ishlah Pariangan memiliki latar belakang yang cukup panjang, pertama kali dibangun pada tahun 1930 dan kemudian secara resmi organisasi yang ada saat ini dibentuk pada tahun 1991. Komposisi pengurus masjid terdiri dari 27 individu, yang menunjukkan adanya struktur organisasi yang cukup besar dalam pengelolaan aktivitas masjid. Namun, jumlah pengurus yang besar tersebut juga dapat menyebabkan masalah koordinasi jika tidak didukung oleh sistem pengelolaan yang profesional dan terorganisir.

Dari aspek ekonomi, sumber pendapatan utama masjid berasal dari penyewaan dua unit ruko. Selama enam bulan, setiap ruko memberikan pendapatan sekitar Rp2 juta, sehingga total pendapatan sewa yang diperoleh mencapai Rp4 juta per semester. Pendapatan tersebut masih dianggap rendah untuk memenuhi kebutuhan operasional dan mendukung berbagai kegiatan masjid. Di samping itu,

pengurus juga menghadapi masalah berupa keterlambatan pembayaran sewa dari penyewa ruko serta keadaan ekonomi masyarakat yang kurang stabil, sehingga berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memberikan sumbangan maupun melakukan penyewaan.

Dari sudut pandang manajemen keuangan, pencatatan keuangan di masjid masih dilakukan dengan cara yang sederhana, menggunakan buku kas atau catatan manual. Hal ini juga dibahas dalam penelitian Anggitaningsih et al. (2025), Setiap transaksi kas, baik penerimaan maupun pengeluaran yang dibuktikan dengan nota, dicatat dan disusun dalam laporan keuangan mingguan oleh bendahara.

Pengurus masjid pun belum mengenali atau menerapkan ISAK 335 dalam penyusunan laporan keuangan. report keuangan masjid juga tidak pernah diaudit, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masih kurang optimal. Situasi ini dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan dari masyarakat maupun lembaga pemberi bantuan karena potensi kesalahan atau penyalahgunaan dana sulit untuk terdeteksi lebih awal.

Kendala lainnya yang dihadapi adalah pengelolaan yang masih bersifat kekeluargaan. Situasi ini menyebabkan kurangnya tingkat profesionalisme dalam proses pengambilan keputusan, penagihan sewa ruko yang tidak tegas karena adanya hubungan pribadi dengan penyewa, serta kesulitan dalam menerapkan standar akuntansi dan audit yang dianggap terlalu resmi untuk lingkungan masjid. Sebagai akibatnya, pengelolaan aset dan dana umat belum optimal dan dapat memicu penurunan kepercayaan publik jika kondisi ini terus berlanjut.

Sebagai solusi perbaikan, masjid direkomendasikan untuk mulai melaksanakan pelatihan dasar akuntansi masjid dan memperkenalkan ISAK 335 secara sederhana kepada pengurus. Disamping itu, penting untuk memisahkan fungsi antara bendahara, penagih sewa, dan pengurus kegiatan supaya sistem pengelolaan menjadi lebih profesional. Pengurus juga perlu menyusun perjanjian sewa yang jelas beserta konsekuensi atas keterlambatan pembayaran, serta memberikan kesempatan untuk pelaksanaan audit internal oleh jamaah yang memiliki keahlian dalam akuntansi dan pengelolaan keuangan.

3. *Mesjid Baburahim Batu Basa*

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H. Mifta Novi selaku Ketua Umum Pengurus Masjid Baburrahim Batu Basa pada tanggal 8 Mei 2026, peneliti memperoleh sejumlah informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Untuk memperoleh data tersebut, beberapa pertanyaan diajukan kepada narasumber, antara lain sebagai berikut:

- a. Apakah pengurus sudah mengetahui atau mendengar tentang ISAK 335?

“Belum”.

Berdasarkan jawaban dari pengurus masjid disimpulkan bahwa masjid ini belum mengetahui terkait ISAK 335 dan masih asing mendengar ISAK 335.

- b. Apakah masjid punya pendapatan lain selain dari infak dan sedekah?

“Kito punyo asset sawah Alhamdulillah sebanyak 16 lupak, dan panenno duo kali setahun, dan untuk yang menggarapnya itu jamaah, jadi hasilnyo setengah untuk masjid, setengah untuk penggarap”.

“Kita punya asset sawah alhamdulillah sebanyak 16 bidang dan panen dua kali setahun, dan untuk menggarapnya itu jamaah, jadi hasilnya setengah untuk masjid, setengah untuk penggarap”.

Dari jawaban yang diberikan oleh pengurus masjid disimpulkan bahwa masjid ini memiliki

pendapatan lain berupa sawah sebanyak 16 bidang, yang nantinya pendapatan dari sawah tersebut dialokasikan untuk masjid dan jamaah.

- c. Bagaimana sistem pencacatan keuangan yang digunakan pada masjid?
”Pakai neraca yang mencatat uang masuk dan uang keluar saja”.

Berdasarkan jawaban ini diketahui bahwa pencatatan keuangan masjid hanya mencatat uang masuk dan uang keluar saja, yang artinya belum sesuai dengan ISAK 335. Dapat disimpulkan bahwa pencatatan keuangan masih mencatat uang masuk dan uang keluar saja, hal ini juga dibahas dalam penelitian Hamid et al. (2026) bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pengelola masjid masih menggunakan pencatatan kas mingguan sederhana, yaitu seluruh transaksi dicatat hanya ketika kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. cara ini memang memudahkan dalam pemantauan kas, namun belum sesuai dengan ketentuan ISAK 335 yang mendorong penggunaan basis akrual untuk entitas nonlaba.

Sejarah, Transformasi Manajerial, dan Rencana Pembangunan Masjid Baburrahim Perjalanan panjang Masjid Baburrahim Batu Basa dimulai dari semangat kolektif untuk membangun kembali fisik bangunan pasca musibah kebakaran yang terjadi pada tahun 1955. Setelah fase pembangunan tersebut, upaya pemeliharaan secara berkala mulai dilakukan secara intensif melalui renovasi besar pada tahun 1984. Namun, sebuah langkah *revolusioner* diambil pada tahun 2021, di mana pengurus tidak lagi merencanakan renovasi kecil, melainkan memutuskan untuk membangun total masjid baru yang megah dengan struktur dua lantai. Proyek ambisius ini diperkirakan menelan anggaran sebesar 21 miliar rupiah, yang menunjukkan skala visi besar jemaah dalam menyediakan fasilitas ibadah yang mumpuni bagi masyarakat.

Transformasi institusional masjid ini secara resmi dimulai pada tahun 2014, saat manajemen dialihkan dari status surau menjadi masjid. Perubahan status ini membawa tantangan baru, terutama dalam aspek tata kelola keuangan. Menanggapi adanya berbagai kendala yang sempat muncul pada posisi bendahara serta kerumitan dalam pembukuan keuangan di masa lalu, pengurus mengambil inisiatif strategis dengan mendirikan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa arus kas dan administrasi keuangan dapat dikelola dengan lebih profesional dan memiliki sistem kontrol yang lebih baik guna menghindari penyimpangan di masa mendatang.

Dalam aspek kemandirian ekonomi, Masjid Baburrahim memiliki basis aset yang sangat kuat dan berdampak langsung pada jemaah. Masjid tercatat mengelola 16 petak sawah yang sangat produktif dengan frekuensi panen dua kali setahun, di mana pengerjaannya dilakukan secara kolaboratif oleh jemaah masjid sendiri. Selain itu, terdapat aset berupa satu lahan ladang yang saat ini belum aktif serta kepemilikan satu unit ambulans untuk layanan sosial. Meskipun sempat merambah dunia bisnis melalui unit usaha Pertashop namun harus berhenti, semangat kewirausahaan pengurus tetap terjaga dengan adanya target jangka panjang untuk memiliki dan mengelola kandang sapi sendiri sebagai sumber pendapatan mandiri bagi organisasi.

Sistem operasional masjid didukung oleh 20 orang pengurus yang mengelola berbagai bidang, termasuk pendistribusian dana untuk kegiatan sosial dan kepemudaan. Alokasi dana masjid tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat melalui dukungan bagi organisasi internal seperti klub sepak bola, pelestarian seni Randai, hingga bantuan bagi warga yang sakit melalui koordinasi dengan Posyandu Remaja. Hal ini menunjukkan bahwa masjid berfungsi sebagai pusat kesejahteraan sosial bagi lingkungan sekitar Batu Basa.

Terkait mekanisme transparansi, pencatatan keuangan di Masjid Baburrahim saat ini masih menggunakan metode pencatatan sederhana. Dalam praktiknya, seluruh sumber dana disatukan dalam satu pembukuan, kecuali untuk dana yang memiliki peruntukan khusus dan mengikat secara syariat seperti santunan anak yatim, wakaf, dan zakat. Meskipun laporan keuangan belum melalui proses audit eksternal secara profesional, akuntabilitas tetap dijaga melalui mekanisme pemeriksaan internal dalam forum Musyawarah Besar (Mubes). Hingga saat ini, pengurus mengakui belum pernah mendengar atau menerapkan ISAK 335 sebagai standar pelaporan keuangan entitas nonlaba, sehingga aspek standarisasi akuntansi menjadi ruang pengembangan di masa depan seiring dengan semakin besarnya nilai aset dan anggaran yang dikelola.

KESIMPULAN

Dari profil ketiga lembaga keagamaan ini menunjukkan adanya *spektrum* pengelolaan yang beragam, mulai dari model masjid berbasis pemberdayaan aset hingga masjid yang fokus pada pelayanan sosial dasar. Masjid Baburrahim Batu Basa menonjol sebagai entitas dengan visi pembangunan paling ambisius melalui proyek masjid dua lantai senilai Rp21 miliar dan kemandirian ekonomi yang kuat melalui pengelolaan 16 petak sawah produktif. Langkah progresif mereka membentuk BMT menjadi jawaban nyata atas kegagalan sistem bendahara di masa lalu, sekaligus menunjukkan bahwa integrasi antara fungsi rumah ibadah dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi solusi mitigasi risiko. Di sisi lain, Masjid Ihsan Batusangkar dan Masjid Ishlah Pariangan memperlihatkan ketergantungan pada sumber pendapatan dari penyewaan ruko serta donasi jemaah, di mana Masjid Ishlah menghadapi tantangan lebih besar berupa rendahnya pendapatan sewa dan keterlambatan pembayaran akibat kondisi ekonomi wilayah yang sulit.

Meskipun memiliki kapasitas finansial yang berbeda, ketiga masjid ini memiliki kesamaan mendasar dalam peran sosialnya, mereka berfungsi sebagai *episentrum* kegiatan kemasyarakatan yang mencakup bidang pendidikan Al-Qur'an, pembinaan remaja melalui *wirid* dan olahraga, hingga bantuan kesehatan bagi warga. Hal ini menegaskan bahwa masjid di wilayah tersebut telah bertransformasi menjadi organisasi sektor publik nirlaba yang memikul tanggung jawab sosial luas. Namun, keberlanjutan program-program mulia ini sangat bergantung pada kualitas tata kelola keuangan yang transparan. Masjid Ihsan secara eksplisit menyadari bahwa akuntabilitas adalah kunci untuk memelihara kepercayaan donatur, namun tantangan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi masih menjadi hambatan universal.

Titik kritis yang ditemukan pada ketiga masjid ini adalah masih lemahnya standarisasi pelaporan keuangan yang sesuai dengan regulasi akuntansi modern. Hingga saat ini, baik Masjid Baburrahim, Ihsan, maupun Ishlah masih terjebak pada metode pencatatan kas sederhana (masuk-keluar) dan belum menyentuh implementasi ISAK 335 sebagai standar pelaporan keuangan entitas nirlaba. Tidak adanya proses audit eksternal dan minimnya pemahaman pengurus mengenai interpretasi standar akuntansi menunjukkan bahwa ada kesenjangan besar antara besarnya tanggung jawab sosial-ekonomi yang mereka emban dengan kapasitas administratif yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam mengedukasi para pengurus untuk beralih dari manajemen tradisional menuju akuntansi sektor publik yang lebih profesional guna memastikan aset umat yang besar terutama pada Masjid Baburrahim dengan anggaran miliaran rupiah dapat dikelola secara efektif, akuntabel, dan bebas dari risiko penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggitaningsih, R., Savitrah, R. M., & Agustiningih, M. D. (2025). Pendampingan Pelaporan Keuangan Masjid Berdasarkan ISAK 35 Berbasis Aplikasi Akuntansi Masjid Pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. 9(1), 183–190.
- Buaton, M. N., Sihite, Y., Ainun, P., Lubis, P. K., & Permata, N. (2026). Analisis Transparansi dan Aksesibilitas Informasi Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Nirlaba Non-Pemerintah Pada Yayasan Hati Gembira Indonesia. 4(4), 23105–23116.
- Castrawijaya, C. (2023). MANAJEMEN MASJID. AMZAH.
- Filiyanti, D., & Ardhiarisca, O. (2025). PENERAPAN ISAK 335 DALAM REKONSTRUKSI LAPORAN SHOLIHIN SITUBONDO. 2(5), 669–675.
- Hamid, A. B., Pribadi, F. N., Nabiilah, N. P., & Zacky, M. F. (2026). Penerapan Isak 335 Dalam Laporan Keuangan Pada Salah Satu Masjid Di Sulawesi Tengah Implementation of Isak 335 in Financial Reports at a Mosque in Central Sulawesi Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu. 9(1), 668–679. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.9664>
- Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Pusaka Almada.
- Mu'allimai, M., Muntaha, S., & Ainun, B. (2024). Implementasi ISAK 335 pada Penyajian Laporan Keuangan Masjid Al Mujahidin Banjarmasin dan Yayasan At Taqwa Banjarmasin. 4(1), 29–43.
- Najmudin, F., & Bayinah, N. (2022). KOMPETENSI TAKMIR DALAM MENJAGA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN MASJID : TELAAH LITERATUR. 10(2), 129–148.
- Nata, A. (2021). Peran dan fungsi masjid di Indonesia dalam perspektif pendidikan Islam. 10(3), 414–432. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v10i2.5203>
- Purati, A., Sahusilawane, W., Yanti, L., & Dkk. (2023). Akuntansi Sektor Publik. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Saiffuddin, A. (2020). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN MASJID BERDASARKAN PSAK NO.45 TENTANG PELAPORAN ORGANISASI Akhreza. (45).
- Ula, I., Halim, M., & Nastiti, A. (2021). Penerapan isak 35 pada masjid baitul hidayah puger jember. 4(2), 152–163.
- Yuliarti, N. C. (2019). Akuntansi Masjid Sebagai Solusi Transparansi Dan Akuntabilitas Publik. 4(1), 13–21.
- Yusra, M., & Si, M. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Universitas Malikussaleh.